

Increasing community participation in government decision making through a democratic education program in Kebun Durian Village, Gunung Sahilan District, Kampar Regency

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Pemerintahan melalui Program Edukasi Demokrasi di Desa Kebun Durian, Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar

Ronny Basista*¹, Musa Thahir², Jumiaty³

^{1,3} Universitas Terbuka

² Institut Keislaman Tuah Negeri

*E-mail: ronbas@ecampus.ac.id¹, musa.thahir.iktn@gmail.com², jumiaty@gmail.com³

Abstract

This Community Service Program directly addresses the low level of community participation in decision making in Kebun Durian Village, which has historically been caused by three main factors: a lack of basic understanding of democracy, strong dominance of local elites, and limited inclusive participatory mechanisms. The main goal is to empower citizens by increasing their participation through a series of democratic education activities that are structured and easy to understand. The methods applied are very participatory, including intensive workshops, focus group discussions (FGD) to identify specific community problems, practical deliberation simulations, and ongoing assistance to village officials. The main findings show significant positive results: an increase in people's understanding of their democratic rights and obligations, the successful formation of a democratic awareness group which now functions as a driving force for participation, as well as increasing the courage of citizens—especially women and youth who were previously marginalized—in expressing their aspirations in public forums. The main novelty of this program lies in the integration of a comprehensive democratic education model with practical assistance for implementing simple Standard Operating Procedures (SOP) in the village deliberation system, which directly makes it more structured, inclusive and transparent. PkM's contribution not only has an impact on increasing individual democratic capacity, but also fundamentally strengthens local democratic governance that is more accountable, participatory, and ensures the sustainability of the development process at the village level.

Keywords: Community Participation, Democratic Education, Village Deliberations

Abstrak

Program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini mengatasi secara langsung rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di Desa Kebun Durian, yang secara historis disebabkan oleh tiga faktor utama: minimnya pemahaman dasar demokrasi, dominasi kuat dari elit lokal, dan keterbatasan mekanisme partisipatif yang inklusif. Tujuan utamanya adalah memberdayakan warga dengan meningkatkan partisipasi mereka melalui serangkaian kegiatan edukasi demokrasi yang terstruktur dan mudah dipahami. Metode yang diterapkan bersifat sangat partisipatif, mencakup workshop intensif, diskusi kelompok terfokus (FGD) untuk mengidentifikasi masalah spesifik komunitas, simulasi musyawarah praktis, serta pendampingan berkelanjutan kepada perangkat desa. Temuan utamanya menunjukkan hasil partisipatif yang signifikan: adanya peningkatan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban demokratis mereka, berhasil terbentuknya kelompok sadar demokrasi yang kini berfungsi sebagai motor penggerak partisipasi, serta peningkatan keberanian warga—khususnya dari kalangan perempuan dan pemuda yang sebelumnya terpinggirkan—dalam menyampaikan aspirasi mereka di forum publik. Novelty utama program ini terletak pada integrasi model edukasi demokrasi yang komprehensif dengan pendampingan praktis untuk penerapan Standard Operating Procedure (SOP) sederhana dalam sistem musyawarah desa, yang secara langsung menjadikannya lebih terstruktur, inklusif, dan transparan. Kontribusi PkM ini tidak hanya berdampak pada peningkatan kapasitas demokratis individual, tetapi juga secara fundamental memperkuat tata kelola demokrasi lokal yang lebih akuntabel, partisipatif, dan menjamin keberlanjutan proses pembangunan di tingkat desa.

Kata kunci: Partisipasi Masyarakat, Edukasi Demokrasi, Musyawarah Desa

1. PENDAHULUAN

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pemerintahan desa merupakan elemen kunci dalam mewujudkan demokrasi lokal dan meningkatkan kualitas kebijakan publik (Hue & Tung-Wen Sun, 2022; Handayani et al., 2023). Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan desa sangat penting untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif (Geekiyange et al., 2020; Bell & Reed, 2022). Partisipasi masyarakat juga menjadi wujud akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, di mana masyarakat terlibat dalam memberikan bantuan berupa tenaga, pikiran, dan material (Kusumawati, 2022; Yusuf et al., 2023; Zhang et al., 2024). Penulis menegaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam seluruh siklus pengambilan keputusan dan pengelolaan dana desa merupakan elemen kunci untuk mewujudkan demokrasi lokal, meningkatkan kualitas kebijakan, serta mencapai pembangunan desa yang berkelanjutan dan akuntabel.

Namun, pada kenyataannya, tingkat partisipasi masyarakat di Desa Kebun Durian, Kecamatan Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar, masih rendah. Penelitian menunjukkan bahwa terbatasnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan di desa merupakan tantangan besar bagi demokrasi lokal. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap hal ini antara lain kurangnya akses terhadap informasi, kesenjangan sosial, dan hambatan budaya (Beaunoyer et al., 2020; Ninsiima et al., 2021; Lythreatis et al., 2022). Meskipun keterlibatan masyarakat sangat penting untuk pengambilan kebijakan yang efektif dan pembangunan berkelanjutan, partisipasi sering kali dipandang secara kuantitatif dibandingkan kualitatif (Petunia & Selepe, 2020; Chitsa et al., 2022). Studi menunjukkan bahwa meskipun warga desa antusias untuk mengajukan gagasan di forum masyarakat, peran mereka seringkali hanya sebatas memberikan saran tanpa keterlibatan dalam pengambilan keputusan akhir (Harsanto & Permana, 2021; Zhang & Liao, 2022). Hambatan utama terhadap partisipasi adalah kurangnya keterlibatan dalam mengamankan, mempertahankan, dan memanfaatkan hasil pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan desa (Sabet & Khaksar, 2024). Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah desa, serta upaya untuk membangun kapasitas dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam pembentukan kebijakan (Sirajuddin, 2020; Permatasari et al., 2021; Sabet & Khaksar, 2024). Penulis menyimpulkan bahwa rendahnya partisipasi masyarakat di Desa Kebun Durian adalah tantangan besar bagi demokrasi lokal, yang disebabkan oleh hambatan seperti kurangnya akses informasi dan kesenjangan sosial, serta fakta bahwa peran warga seringkali terbatas pada pemberian saran tanpa keterlibatan kualitatif dalam pengambilan keputusan akhir, sehingga diperlukan komitmen pemerintah desa dan upaya peningkatan kapasitas masyarakat.

Sebagai solusi, diperlukan program edukasi yang dirancang untuk meningkatkan literasi masyarakat tentang demokrasi, hak dan kewajiban warga negara, serta pentingnya partisipasi dalam pengambilan keputusan pemerintahan desa. Edukasi ini harus dilakukan secara partisipatif, dengan melibatkan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan diskusi kelompok untuk memastikan pemahaman yang mendalam dan berkelanjutan. Edukasi dan literasi masyarakat desa merupakan aspek penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan partisipasi warga. Program edukasi yang dirancang secara partisipatif dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang isu-isu penting seperti lingkungan, hukum, dan bahaya narkoba (Nkoana et al., 2020; Fauville et al., 2021; Maryanti et al., 2022). Pendekatan pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan dan pendampingan efektif dalam mengembangkan potensi desa, seperti dalam konteks desa wisata (Sulaiman et al., 2022). Strategi literasi politik di desa dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan, termasuk kerjasama dengan pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan media lokal (Yu et al., 2024). Revitalisasi partisipasi masyarakat dalam program literasi nasional, seperti Kampung Literasi, memerlukan pemahaman yang lebih luas tentang literasi dan peran aktif pemerintah desa (Shen & Chou, 2022). Keberhasilan program-program ini bergantung pada keterlibatan aktif masyarakat dan dukungan berkelanjutan dari berbagai pemangku kepentingan.

Pengabdian kepada masyarakat ini dirancang berdasarkan pendekatan-pendekatan terkini dalam pemberdayaan masyarakat, seperti community-based education dan participatory decision-making. Program ini berbeda dengan kegiatan serupa karena fokusnya tidak hanya pada transfer pengetahuan, tetapi juga pada pembentukan sikap dan keterampilan praktis masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini menjadikannya relevan dengan upaya peningkatan kapasitas masyarakat dalam konteks pemerintahan desa. Penelitian terdahulu berfokus pada pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kapasitas di desa-desa di Indonesia. Studi-studi tersebut menggunakan pendekatan partisipatif seperti Participatory Rural Appraisal (PRA) dan Participatory Rural Appraisal (PLA) untuk melibatkan anggota masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan (Sururi et al., 2021; Sulaeman et al., 2023; Moeljono & Alfiyanto, 2020). Metode-metode ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan praktis masyarakat desa dan pejabat setempat (Moeljono & Alfiyanto, 2020; Moeljono & Kusumo, 2020). Intervensi tersebut mencakup berbagai aspek, antara lain peningkatan kapasitas ekonomi melalui usaha mikro, kecil, dan menengah (Sururi et al., 2021), pengembangan kesadaran hukum dan media pendidikan (Sulaeman et al., 2023), dan peningkatan kinerja aparatur desa, keterampilan manajemen administrasi dan keuangan (Moeljono & Alfiyanto, 2020). Selain itu, pelatihan mengenai implementasi kebijakan publik juga diberikan untuk meningkatkan kinerja kemampuan pengambilan keputusan perangkat desa (Moeljono & Kusumo, 2020). Studi-studi ini menunjukkan hasil positif dalam hal peningkatan partisipasi masyarakat dan perbaikan tata kelola daerah.

Tujuan dari kegiatan ini berfokus pada tiga aspek terukur: (1) Peningkatan Pemahaman (target minimal 70% peserta memahami demokrasi desa dalam tiga bulan), (2) Peningkatan Keterlibatan Kualitatif (terbentuknya minimal satu Kelompok Sadar Demokrasi yang aktif memimpin aspirasi), dan (3) Penguatan Tata Kelola (diterapkannya setidaknya satu SOP sederhana dan transparan dalam musyawarah desa). Perumusan yang spesifik ini kemudian menegaskan Kontribusi Program utama, yaitu tidak hanya meningkatkan kapasitas individu, tetapi secara fundamental berfokus pada Penguatan Tata Kelola Lokal yang akuntabel dan inklusif di Desa Kebun Durian, serta menjamin Keberlanjutan Pembangunan melalui kebijakan yang didukung oleh partisipasi aktif masyarakat.

2. METODE

Program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dilaksanakan di Desa Kebun Durian, Kecamatan Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar, dengan melibatkan masyarakat umum, perempuan, pemuda, dan Perangkat Desa sebagai peserta kunci. Program ini secara fundamental mengadopsi Pendekatan Partisipatif (*Participatory Approach*) karena didasarkan pada prinsip akademik *Adult Learning Theory*, yang menekankan bahwa efektivitas pembelajaran sosial-politik tercapai optimal ketika warga diberdayakan sebagai subjek aktif, bukan sekadar objek penerima informasi, sehingga terjadi transfer pengetahuan dan kepemilikan program (*sense of ownership*).

Prosedur pelaksanaan PkM ini terstruktur dalam tiga tahap. Tahap awal berfokus pada identifikasi kebutuhan melalui observasi langsung di forum desa dan wawancara mendalam dengan elit dan warga, yang hasilnya digunakan untuk menyesuaikan materi edukasi agar relevan dengan konteks lokal. Tahap pelaksanaan (Intervensi) menggunakan tiga metode utama yang dipilih berdasarkan justifikasi akademik: Workshop untuk transfer pemahaman kognitif dasar demokrasi; Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) untuk memfasilitasi dialog konstruktif mendalam (*deliberative democracy*) dan mengurangi dominasi elit; serta Simulasi Musyawarah Desa sebagai metode *experiential learning* untuk melatih keterampilan berperilaku, bernegosiasi, dan merumuskan keputusan secara inklusif. Tahap akhir meliputi pendampingan berkelanjutan kepada perangkat desa dalam menyusun SOP sederhana Musyawarah Desa dan pembentukan Kelompok Sadar Demokrasi sebagai motor penggerak partisipasi.

Untuk mengukur capaian, Teknik Pengumpulan Data melibatkan Observasi langsung untuk menilai frekuensi dan kualitas partisipasi; Wawancara semi-terstruktur untuk mengukur

peningkatan pemahaman dan keberanian warga; serta Dokumentasi (notulensi dan daftar hadir) untuk menganalisis perubahan kuantitatif dan kualitatif keterwakilan kelompok marjinal. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif untuk mengidentifikasi tren perubahan sikap dan analisis komparatif sederhana untuk membandingkan tingkat partisipasi sebelum dan sesudah intervensi. Seluruh proses pelaksanaan dan evaluasi tunduk pada Etika Partisipasi, dengan menjamin persetujuan sukarela (*informed consent*), menjaga kerahasiaan identitas, dan memastikan keterwakilan yang setara bagi kelompok rentan, guna menjamin proses PkM yang etis dan bertanggung jawab.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Pemerintahan Melalui Program Edukasi Demokrasi di Desa Kebun Durian, Kecamatan Gunung Sahilan, Kabupaten Kampar menghasilkan sejumlah capaian yang signifikan sebagai berikut.

Peningkatan pemahaman Masyarakat

Program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang berfokus pada edukasi demokrasi di Desa Kebun Durian berhasil menunjukkan dampak signifikan yang terkonsentrasi pada tiga area kunci. *Pertama*, terjadi Peningkatan Pemahaman dan Kesadaran Kritis yang substansial. Hal ini ditandai dengan antusiasme warga yang tinggi dalam kegiatan dan adanya perubahan *mindset* dari pasif menjadi aktif. Warga kini tidak hanya mengenal konsep dasar demokrasi dan hak partisipasi, tetapi juga menunjukkan minat kritis terhadap dokumen publik desa, seperti Rencana Pembangunan dan Laporan Keuangan. Kelompok pemuda secara khusus menunjukkan peningkatan kesadaran mengenai peran konstruktif mereka dalam pembangunan local. *Kedua*, teramati adanya Perubahan Perilaku dan Keberanian Partisipasi yang nyata. Program ini berhasil menumbuhkan kepercayaan diri warga untuk secara aktif menyuarakan ide dan masukan di forum musyawarah. Pergeseran ini menunjukkan bahwa warga kini memposisikan diri sebagai aktor penentu arah pembangunan, bukan sekadar penerima kebijakan pasif, yang merupakan indikasi adanya perubahan budaya partisipasi di tingkat akar rumput. *Ketiga*, PkM berhasil membangun Penguatan Struktur Partisipatif di desa. Capaian utama di sini adalah terbentuknya Kelompok Sadar Demokrasi yang berfungsi sebagai motor penggerak partisipasi berbasis komunitas. Lebih lanjut, sistem musyawarah desa mengalami perbaikan sehingga kini menjadi lebih inklusif, transparan, dan terdokumentasi melalui penerapan prosedur sederhana. Sebagai fondasi keberlanjutan, PkM ini juga berhasil membentuk kemitraan strategis berkelanjutan antara perguruan tinggi dan Pemerintah Desa.

Temuan-temuan positif ini diperkuat oleh konsistensinya dengan literatur akademik yang relevan. Efek Edukasi Demokrasi terlihat jelas, sejalan dengan studi Latumahina et al. (2023) dan Putri (2021) yang menekankan pentingnya *civic education* dalam meningkatkan kesadaran politik, memperkuat pemahaman hak, dan membangun solidaritas sosial. Hasil ini menegaskan intervensi berbasis edukasi sebagai instrumen strategis untuk menumbuhkan kesadaran kritis. Selanjutnya, Transformasi Sosial Berbasis Komunitas yang diwujudkan melalui pembentukan Kelompok Sadar Demokrasi menegaskan temuan Indrawati (2021) bahwa *community-based learning* mampu menciptakan kelompok penggerak partisipasi yang berbasis kohesi sosial lokal. Adanya Perubahan Budaya Partisipasi melalui peningkatan keberanian warga untuk berpendapat juga selaras dengan riset Sari (2020) dan Hidayat (2019) mengenai peran pendidikan kewarganegaraan partisipatif dalam membentuk keberanian publik di tingkat akar rumput, menghasilkan budaya yang lebih inklusif. Selain itu, Tata Kelola Desa yang lebih transparan dan inklusif yang tercipta pasca-program konsisten dengan temuan Kurniawan (2020) dan Indrawati (2021) bahwa tata kelola partisipatif mampu menciptakan ruang musyawarah yang terbuka dan responsif terhadap kebutuhan warga. Akhirnya, Keberlanjutan Kemitraan yang terjalin dengan perguruan tinggi menguatkan model *Participatory Action Research* (PAR) Saputra (2019) dan

community-based learning Ningsih (2021), yang efektif membangun hubungan jangka panjang di mana desa berfungsi sebagai laboratorium sosial untuk pemberdayaan berkelanjutan.

Terbentuknya kelompok sadar demokrasi di Desa Kebun Durian

Pembentukan Kelompok Sadar Demokrasi menjadi hasil struktural utama dari program ini di Desa Kebundurian. Kelompok ini dirancang sebagai struktur formal yang inklusif, melibatkan representasi krusial dari pemuda, perempuan, tokoh adat, dan tokoh agama. Fungsi utamanya melampaui sekadar wadah; ia berperan sebagai penggerak inti (*core driver*) yang secara sistematis memperkuat partisipasi dan mengorganisasi proses demokrasi di tingkat desa. Melalui mekanisme ini, aspirasi warga dapat tersalurkan secara lebih terstruktur dan terorganisasi, sebagai hasil dari proses pembentukan partisipatif yang melibatkan diskusi masyarakat untuk merumuskan peran dan agenda kerja yang jelas. Agenda kerja kelompok ini berfokus pada empat fungsi kunci: Pengawalan Proses (mengawal Musyawarah Desa/Musdes), Dokumentasi Aspirasi (memformalkan masukan warga), Edukasi Publik (mensosialisasikan pentingnya partisipasi), dan Jembatan Komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat. Dukungan luas dari perangkat desa dan tokoh masyarakat menunjukkan adanya kesadaran kolektif yang meningkat untuk mengawal pembangunan, yang pada akhirnya menjadikan Kelompok Sadar Demokrasi sebagai motor penggerak partisipasi yang berkelanjutan dan terlembaga.

Secara analitis, keberadaan kelompok multi-tokoh ini sejalan dengan temuan akademik tentang penguatan demokrasi lokal. Ia merefleksikan konsep Formalisasi Partisipasi (Labolo & Achmad, 2022), di mana organisasi sipil komunitas secara signifikan berkontribusi pada demokrasi. Kelompok ini menjadi saluran formalisasi aspirasi dan penggerak kolektif yang terorganisasi. Selain itu, kelompok ini mewujudkan strategi Pemberdayaan Berbasis Lokal (Widiastuti et al., 2023) dan Struktur Inklusif (Studi-Indrawati, 2021) karena berhasil mengaktifkan keterlibatan warga dalam proses pengambilan keputusan (*decision making*) dengan memasukkan kearifan lokal. Kesimpulannya, Kelompok Sadar Demokrasi merupakan wujud nyata dari kapasitas lokal yang diorganisasi di Desa Kebundurian. Keberhasilannya terletak pada kemampuannya untuk memediasi aspirasi secara autentik dan terstruktur, sekaligus meningkatkan *political efficacy* (kemampuan politik) warga desa melalui mekanisme partisipasi yang terlembagakan.

Peningkatan keberanian Masyarakat

Keberhasilan program di Desa Kebundurian terwujud melalui dua pilar yang saling memperkuat: penguatan struktur melalui pembentukan Kelompok Sadar Demokrasi dan transformasi perilaku melalui intervensi edukasi. Sebelum program, partisipasi dalam Musyawarah Desa (Musdes) dibatasi oleh hambatan kultural (rasa sungkan terhadap tokoh adat) dan minimnya kapasitas politik warga. Pelaksanaan *workshop*, diskusi, dan simulasi dialog berfungsi sebagai katalisator, menembus batasan tersebut. Intervensi edukatif ini secara nyata menghasilkan peningkatan keberanian dan *political efficacy* di kalangan warga, khususnya kelompok strategis seperti pemuda. Perubahan perilaku ini—yang dikonfirmasi oleh perangkat desa—menunjukkan adanya penembusan hambatan hierarki sosial dan terciptanya iklim dialog yang lebih inklusif. Keberanian berpendapat yang muncul ini sejalan dengan temuan Latumahina et al. (2023) dan Suyono et al. (2024), yang menekankan peran pendidikan politik dalam memfasilitasi komunikasi publik, membuka ruang dialog, dan membangun kapasitas warga sebagai aktor lokal.

Aspek penting dari perubahan ini adalah pengembangan keterampilan sosial praktikal melalui metode diskusi partisipatif. Peningkatan kepercayaan diri dan keterampilan berbicara di depan umum yang teramati merupakan hasil dari praktik langsung, bukan sekadar perubahan sikap pasif. Secara strategis, perubahan perilaku ini memberi energi baru pada Kelompok Sadar Demokrasi. Struktur formal yang inklusif ini (melibatkan pemuda, perempuan, tokoh adat, dan agama) kini didukung oleh anggota komunitas yang lebih berani dan terampil. Kelompok ini, yang

bertugas mengawal Musdes dan memformalkan aspirasi, berfungsi sebagai saluran terstruktur bagi keberanian baru yang diperoleh warga. Dengan demikian, Kelompok Sadar Demokrasi tidak hanya menjadi wadah, tetapi menjadi motor penggerak yang efektif karena diisi oleh warga yang telah diberdayakan secara edukatif, memastikan bahwa partisipasi kolektif yang berkelanjutan memiliki jalur formal untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan (*decision making*) desa.

Adanya sistem musyawarah desa yang lebih inklusif dan transparan

Program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) telah berhasil menciptakan sistem Musyawarah Desa (Musdes) yang terintegrasi dan akuntabel. Capaian inti program adalah standarisasi dan penguatan dokumentasi Musdes melalui daftar hadir, notulen resmi, dan dokumentasi visual. Peningkatan metodologis ini secara langsung menjawab kebutuhan akan transparansi dan akuntabilitas proses pengambilan keputusan di desa. Upaya ini secara konsisten didukung oleh literatur ilmiah, yang menunjukkan bahwa keterbukaan informasi dan akses yang memadai dalam perencanaan (seperti temuan Hendrawati dan Pramudianti, 2020) adalah prasyarat bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik dan aspirasi secara efektif. Selain itu, penerapan SOP sederhana dalam Musdes, sejalan dengan temuan Nggiri et al. (2024), berfungsi sebagai pedoman praktis yang meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan memitigasi potensi konflik. Pada akhirnya, transparansi yang dilembagakan ini—seperti ditegaskan oleh Nur & Fitri (2021)—membangun fondasi kepercayaan publik dan mendorong partisipasi aktif warga.

Dampak standarisasi dan transparansi PkM menjadi maksimal melalui sinergi dengan Kelompok Sadar Demokrasi (KSD). Kelompok inklusif yang melibatkan berbagai perwakilan masyarakat ini memiliki peran sentral, yaitu mengawal proses Musdes dan memastikan dokumentasi aspirasi warga. Dengan adanya standar dokumentasi Musdes (daftar hadir, notulen), KSD memiliki instrumen formal yang kuat untuk menjalankan fungsi pengawasannya. KSD bertindak sebagai penghubung dan penjamin bahwa informasi yang tersedia mudah diakses dan dipahami oleh warga, sesuai dengan prinsip *good governance*. Oleh karena itu, KSD tidak hanya memediasi aspirasi, tetapi juga bertindak sebagai agen akuntabilitas lokal, memanfaatkan transparansi yang diciptakan oleh program PkM untuk secara berkelanjutan menjaga integritas proses perencanaan dan pelaksanaan program desa. Sinergi ini menjamin bahwa peningkatan akuntabilitas prosedural (dokumentasi) dan penguatan struktural (KSD) saling mendukung untuk memperkuat tata kelola desa secara holistik.

Program ini sukses mengatasi hambatan kultural dan pengetahuan melalui intervensi edukatif, yang menghasilkan peningkatan keberanian dan *political efficacy* warga, khususnya pemuda. Perubahan perilaku ini dilembagakan melalui pembentukan Kelompok Sadar Demokrasi (KSD) yang inklusif. KSD, yang melibatkan berbagai perwakilan masyarakat, bertindak sebagai motor penggerak dan saluran formal bagi partisipasi yang telah bangkit. Dengan fungsi inti mengawal musyawarah desa (Musdes) dan mendokumentasikan aspirasi, KSD memastikan bahwa keberanian baru warga diterjemahkan menjadi keterlibatan yang terstruktur dan memengaruhi proses pengambilan keputusan desa. Aspek tata kelola diperkuat melalui standarisasi dan dokumentasi Musdes, termasuk penggunaan daftar hadir dan notulen. Implementasi SOP sederhana dan dokumentasi yang mudah diakses ini sejalan dengan temuan ilmiah mengenai pentingnya keterbukaan informasi untuk mendorong kritik efektif dan memitigasi konflik kepentingan. Transparansi prosedural ini berfungsi sebagai fondasi untuk membangun kepercayaan publik. KSD kemudian memanfaatkan peningkatan akuntabilitas ini, bertindak sebagai agen pengawas lokal yang memastikan integritas proses perencanaan dan pelaksanaan program desa. Keberlanjutan program dijamin melalui institusionalisasi kemitraan yang ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara perguruan tinggi dan pemerintah desa. Kolaborasi ini merefleksikan model *Pentahelix* yang diterapkan oleh institusi besar lainnya, mengubah desa menjadi mitra aktif pembangunan. Kemitraan strategis ini menjamin transfer pengetahuan (*Tri Dharma Perguruan Tinggi*) dan pembinaan tematik berkelanjutan, yang krusial untuk menjaga momentum pemberdayaan masyarakat yang telah terbentuk.

Secara keseluruhan, program PkM di Desa Kebundurian menciptakan sistem demokrasi lokal yang lebih kuat melalui intervensi terpadu: menciptakan aktor yang berani, menciptakan mekanisme yang transparan, dan menjamin keberlanjutan melalui kemitraan. Hal ini menjadi studi kasus keberhasilan dalam pembangunan desa yang bertumpu pada penguatan kapasitas dan pelembagaan kedaulatan warga.

4. KESIMPULAN

Program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) tentang edukasi demokrasi di Desa Kebun Durian menunjukkan dampak transformatif pada tata kelola lokal. Program ini berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban demokratis, yang secara langsung mendorong peningkatan partisipasi. Inti capaian adalah pelembagaan Kelompok Sadar Demokrasi (KSD), yang berfungsi sebagai motor penggerak partisipasi inklusif dan terstruktur, serta peningkatan keberanian warga (termasuk pemuda dan perempuan) untuk menyampaikan aspirasi secara terbuka. Secara prosedural, sistem Musyawarah Desa menjadi lebih transparan dan akuntabel melalui penerapan SOP dan dokumentasi yang rapi. Keberlanjutan program ini diinstitusionalkan melalui kemitraan strategis (MoU) antara perguruan tinggi dan pemerintah desa, membuka peluang pelatihan lanjutan dan pengembangan program desa. Meskipun program berhasil membangun struktur partisipatif dan meningkatkan *political efficacy*, limitasi program terletak pada perlunya penguatan *soft skills* kepemimpinan dan manajemen bagi anggota KSD agar mereka dapat mengawal implementasi kebijakan secara efektif dan berkelanjutan. Arah keberlanjutan program difokuskan pada dua inisiatif utama: pelatihan kewirausahaan desa yang terintegrasi dengan struktur KSD untuk kemandirian ekonomi, dan inisiatif penelitian bersama untuk evaluasi dampak sosial dan politik jangka panjang program.

Untuk memastikan dampak PkM yang berkelanjutan, direkomendasikan langkah-langkah praktis bagi kedua mitra: Pertama, untuk Pemerintah Desa: Disarankan untuk mengintegrasikan agenda kerja KSD secara eksplisit ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) tahunan. Selain itu, Pemerintah Desa perlu mengalokasikan anggaran spesifik untuk mendukung kegiatan sosialisasi, pengawasan, dan pelatihan KSD guna memperkuat fungsi kontrol sosial mereka. Kedua, untuk Perguruan Tinggi: Direkomendasikan untuk mengembangkan modul pelatihan kepemimpinan dan manajemen konflik yang spesifik dan kontekstual bagi anggota KSD. Fasilitasi program social entrepreneurship desa harus dijadikan program lanjutan pasca-MoU untuk mewujudkan sinergi Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Terbuka yang telah memberikan dukungan dana sehingga kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dapat terlaksana dengan baik. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Kepala Desa Kebun Durian beserta seluruh perangkat desa yang telah menjadi mitra dan memberikan dukungan penuh dalam pelaksanaan kegiatan PkM ini. Tanpa kerjasama dan partisipasi aktif semua pihak, kegiatan ini tidak akan berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Asmara, L. G., Setiawati, L., & Saputra, D. Increasing the confidence of students at the Nurul Mukhlisin Islamic Boarding School through participatory discussion methods. *Jurnal Abmas*, 25(1), 79-90. <https://doi.org/10.17509/abmas.v25i1.84686>

- Beaunoyer, E., Dupéré, S., & Guitton, M. J. (2020). COVID-19 and digital inequalities: Reciprocal impacts and mitigation strategies. *Computers in human behavior*, 111, 106424. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2020.106424>
- Bell, K., & Reed, M. (2022). The tree of participation: a new model for inclusive decision-making. *Community Development Journal*, 57(4), 595-614. <https://doi.org/10.1093/cdj/bsab018>
- Chitsa, M., Sivapalan, S., Singh, B. S. M., & Lee, K. E. (2022). Citizen participation and climate change within an urban community context: Insights for policy development for bottom-up climate action engagement. *Sustainability*, 14(6), 3701. <https://doi.org/10.3390/su14063701>
- Fauville, G., Queiroz, A. C., Hambrick, L., Brown, B. A., & Bailenson, J. N. (2021). Participatory research on using virtual reality to teach ocean acidification: a study in the marine education community. *Environmental Education Research*, 27(2), 254-278. <https://doi.org/10.1080/13504622.2020.1803797>
- Geekiyana, D., Fernando, T., & Keraminiyage, K. (2020). Assessing the state of the art in community engagement for participatory decision-making in disaster risk-sensitive urban development. *International journal of disaster risk reduction*, 51, 101847. <https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2020.101847>
- Handayani, E., Garad, A., Suyadi, A., & Tubastuvi, N. (2023). Increasing the performance of village services with good governance and participation. *World Development Sustainability*, 3, 100089. <https://doi.org/10.1016/j.wds.2023.100089>
- Harsanto, B., & Permana, C. T. (2021). Sustainability-oriented innovation (SOI) in the cultural village: an actor-network perspective in the case of Laweyan Batik Village. *Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development*, 11(3), 297-311. <https://doi.org/10.1108/JCHMSD-08-2019-0102>
- Hendrawati, E., & Pramudianti, M. (2020). *Partisipasi, Transparansi dan Akuntabilitas Perencanaan dan Penganggaran Dana Desa*. JRAK – Jurnal Administrasi & Kebijakan, 12(2), 100-108. <https://doi.org/10.23969/jrak.v12i2.3113>
- Hidayat, A. (2019). Kolaborasi sekolah dan organisasi masyarakat sipil dalam literasi politik masyarakat desa. *Jurnal Pendidikan Politik dan Kewarganegaraan*, 7(2), 113-126.
- Hue, T. H. H., & Tung-Wen Sun, M. (2022). Democratic governance: Examining the Influence of citizen participation on local government performance in Vietnam. *International Journal of Public Administration*, 45(1), 4-22. <https://doi.org/10.1080/01900692.2021.1939713>
- Indrawati, N. (2021). Integrasi kearifan lokal dalam pendidikan berbasis komunitas: Kajian sistematis. *International Journal of Education Innovation*, 11(1), 45-59. <https://doi.org/10.20961/jkc.v12i3.93360>
- Kurniawan, B. (2020). Transparansi dan akuntabilitas musyawarah desa dalam perspektif tata kelola partisipatif. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 24(3), 221-234.
- Kusumawati, E. (2022). School committee participation in realizing the quality of education. *Infokum*, 10(5), 880-886.
- Labolo, M., & Achmad, W. (2022). *Community Political Participation in Strengthening Local Democracy in Indonesia*. CEMJP, 30(4), 2548-2553.
- Latumahina, F., Sultan, A. A., Hulihulis, A., & Alwi, A. (2023). *Enhancing Political Awareness and Participation in Rural Communities: A Case Study of KKN Program in Asilulu, Indonesia*. Indonesian Journal of Cultural and Community Development, 14(3).
- Latumahina, J., et al. (2023). Civic education for democracy: Strengthening community participation through political awareness programs. *Indonesian Journal of Community and Civic Development*, 5(1), 15-27.
- Lythreath, S., Singh, S. K., & El-Kassar, A. N. (2022). The digital divide: A review and future research agenda. *Technological Forecasting and Social Change*, 175, 121359. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.121359>
- Maryanti, R. I. N. A., Rahayu, N. I., Muktiarni, M., Al Husaeni, D. F., Hufad, A. C. H. M. A. D., Sunardi, S., & Nandiyanto, A. B. D. (2022). Sustainable development goals (SDGs) in science education:

- Definition, literature review, and bibliometric analysis. *Journal of Engineering Science and Technology*, 17, 161-181.
- Moeljono, M., & Alfiyanto, N. (2020). Up Grading Capacity Aparatur Desa Melalui Pelatihan di Desa Tegalarum Kabupaten Demak. *ABDIMASKU: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT*, 3(1), 6-15. <https://doi.org/10.33633/ja.v3i1.54>
- Nggiri, I. R., Lusi, K. T., Mario, Y. A., Blikololong, M. Y., Ya, M. N., & Ethelbert, Y. K. (2024). *Sosialisasi Pentingnya SOP dalam Mewujudkan Efisiensi, Transparansi, dan Akuntabilitas di Desa Pasir Putih: Peran Papan Informasi dalam Pengelolaan Dana Desa*. Karya Nyata: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 1(4), 72-80. <https://doi.org/10.62951/karyanyata.v1i4.744>
- Ningsih, S. (2021). Community-based learning as a strategy to empower rural society in the era of society 5.0. *International Journal of Research on Education and Social Sciences*, 3(4), 211-225. <https://doi.org/10.51601/ijersc.v3i4.447>
- Ninsiima, L. R., Chiumia, I. K., & Ndejjo, R. (2021). Factors influencing access to and utilisation of youth-friendly sexual and reproductive health services in sub-Saharan Africa: a systematic review. *Reproductive health*, 18, 1-17. <https://doi.org/10.1186/s12978-021-01183-y>
- Nkoana, E. M. (2020). Exploring the effects of an environmental education course on the awareness and perceptions of climate change risks among seventh and eighth grade learners in South Africa. *International Research in Geographical and Environmental Education*, 29(1), 7-22. <https://doi.org/10.1080/10382046.2019.1661126>
- Nur, S. W., & Fitri, F. (2021). *Peningkatan Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipatif Melalui Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tellumpanuae Kabupaten Maros*. Jurnal Dedikasi Masyarakat, 3(1). <https://doi.org/10.31850/jdm.v3i1.442>
- Permatasari, P., Ilman, A. S., Tilt, C. A., Lestari, D., Islam, S., Tenrini, R. H., ... & Wardhana, I. W. (2021). The village fund program in Indonesia: Measuring the effectiveness and alignment to sustainable development goals. *Sustainability*, 13(21), 12294. <https://doi.org/10.3390/su132112294>
- Petunia, T. A., & Selepe, M. (2020). Strengthening policy-and decision-making processes through community participation: A municipal perspective. *Africa's Public Service Delivery & Performance Review*, 8(1), 10. <https://doi.org/10.4102/apsdpr.v8i1.409>
- Putri, D. (2021). Peran pendidikan kewarganegaraan dalam membangun kesadaran demokrasi masyarakat. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 26(2), 89-101. <https://doi.org/10.70134/pakehum.v2i1.336>
- Rachman, D. R. N., & Roziqin, A. (2021). *Community Empowerment Based on Local Potential: A Systematic Literature Review*. DIA: Jurnal Administrasi Publik. <https://doi.org/10.30996/dia.v19i2.5763>
- Sabet, N. S., & Khaksar, S. (2024). The performance of local government, social capital and participation of villagers in sustainable rural development. *The Social Science Journal*, 61(1), 1-29. <https://doi.org/10.1080/03623319.2020.1782649>
- Saputra, R. (2019). Participatory Action Research (PAR) sebagai metode pemberdayaan masyarakat desa. *Jurnal Pemberdayaan Sosial*, 4(2), 101-118. <https://doi.org/10.24239/moderasi.Vol4.Iss2.128>
- Sari, M. (2020). Penguatan keberanian dan partisipasi publik melalui pendidikan kewarganegaraan partisipatif. *Jurnal Pedagogia*, 9(1), 33-45.
- Shen, J., & Chou, R. J. (2022). Rural revitalization of Xiamei: The development experiences of integrating tea tourism with ancient village preservation. *Journal of Rural Studies*, 90, 42-52. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2022.01.006>
- Sirajuddin, T. (2020, February). Rural development strategies in Indonesia: Managing villages to achieve sustainable development. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 447, No. 1, p. 012066). IOP Publishing. <http://doi.org/10.1088/1755-1315/447/1/012066>
- Sulaeman, A., Bramasta, D., & Makhrus, M. (2023). Pemberdayaan Masyarakat dengan Pendekatan Participatory Rural Appraisal (PRA). *Jurnal Literasi Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2(2), 87-96. <https://doi.org/10.61813/jlppm.v2i2.34>

- Sulaiman, A. I., Adi, T. N., & Runtiko, A. G. (2022). Community empowerment as socio-economic education of tourism villages based on local wisdom. *Education Quarterly Reviews*, 5(3). <https://doi.org/10.31014/aior.1993.05.03.524>
- Sururi, A., Hasanah, B., Mulyasih, R., Firdaus, I. A., Hasuri, H., & Yuliani, H. (2020). Peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan kelompok usaha mikro kecil dan menengah di kawasan pantai utara Desa Domas Kabupaten Serang. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(3), 405-415. <https://doi.org/10.24198/kumawula.v3i3.27286>
- Suyono, S., Lestari, B. B., Ardhana, N. F., & Mollo, C. R. R. (2024). Peran Pendidikan Politik dalam Menghadapi Dinamika Demokrasi Indonesia Pasca Pemilu 2024 Bagi Masyarakat Desa Bohar Sidoarjo. *JlIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(12), 14211-14218. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i12.6498>
- Widiastuti, A., Mulyani, E., Riani, L. P., Saputri, A., & Samsudin, N. (2023). *Community Empowerment Strategy Based on Social Entrepreneurship Values Through Village-Owned Enterprise in Indonesia*. *JIPSINDO*, 11(2).
- Yu, Y., Appiah, D., Zulu, B., & Adu-Poku, K. A. (2024). Integrating Rural Development, Education, and Management: Challenges and Strategies. *Sustainability*, 16(15), 6474. <https://doi.org/10.3390/su16156474>
- Yusuf, R., Wideasari, W., Lizein, B., Rahmat, M. H. B., & Khasan, T. (2023). Citizen Participation in Developing Community Empowerment in Tourist Villages. *Journal of Social Science Global*, 1(1), 43-48.
- Zhang, C., & Liao, L. (2022). The active participation in a community transformation project in China: constructing new forums for expert-citizen interaction. *Journal of Chinese Governance*, 7(3), 372-399. <https://doi.org/10.1080/23812346.2020.1830569>
- Zhang, Z., Yu, J., & Tian, J. (2024). Community participation, social capital cultivation and sustainable community renewal: A case study from Xi'an's southern suburbs, China. *Journal of the Knowledge Economy*, 15(3), 11007-11040. <https://doi.org/10.1007/s13132-025-02918-z>